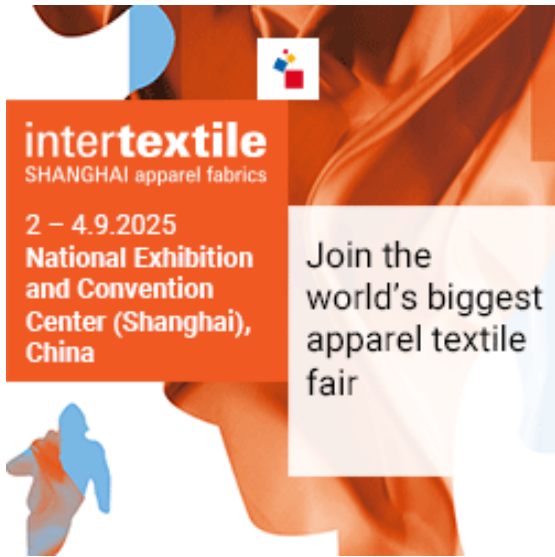


INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



Momentum dan Mendorong Inovasi Global di Industri Mode dan Tekstil

Industri tekstil saat ini tengah menghadapi lanskap bisnis yang terus berubah, lengkap dengan berbagai tantangan. Namun, kondisi yang dinamis ini juga membuka peluang besar, didorong oleh meningkatnya permintaan dari pasar berkembang, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Untuk membantu pelaku industri beradaptasi dan menemukan jalur pertumbuhan, Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition akan digelar pada 2 – 4 September 2025 di National Exhibition and Convention Center, Shanghai.

Dengan meningkatnya jumlah pengunjung domestik dan internasional dalam beberapa edisi terakhir, pameran ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil dan pertukaran inovasi terdepan di dunia.

Tiga Dekade Keunggulan: Memasuki Babak Keempat Intertextile Apparel :Edisi musim gugur 2024 menandai perayaan 30 tahun

Intertextile, dengan hampir 4.000 peserta pameran dari 26 negara dan wilayah, serta kunjungan lebih dari 100.000 orang — jumlah pengunjung internasional naik 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum ini berlanjut di edisi musim semi 2025, yang mencatat hampir 95.000 pengunjung dari 131 negara dan wilayah, atau naik 17%.

Ms Wilmet Shea, General Manager Messe Frankfurt (HK) Ltd, menekankan pentingnya pameran ini: “Pertumbuhan Intertextile dari dekade ke dekade membuktikan kemampuannya menghubungkan pemasok global dengan pembeli visioner. Meski pasar saat ini penuh ketidakpastian, jangkauan internasional pameran ini justru membuka peluang bisnis di seluruh rantai nilai tekstil. Fokus kami pada inovasi dan tren desain terbaru menjadi komitmen kami terhadap keberlanjutan dan transformasi digital. Ini terlihat di berbagai zona khusus, seperti Digital Solutions Zone, Premium Wool Zone, dan Verve for Design, yang menjadi tempat penting bagi pembeli untuk tetap mengikuti perkembangan. Sementara itu, inisiatif Texpertise Econogy memperkuat komitmen kami terhadap keberlanjutan dan transformasi digital — dua pilar masa depan industri.”

Sebagai salah satu platform pengadaan terbesar di industri ini, Intertextile Apparel terus menjadi pusat tren global melalui zona-zona beragam, seperti Accessories Vision, Beyond Denim, Functional Lab, dan SalonEurope. Di edisi 2024, dua zona baru juga diluncurkan: Econogy Hub, yang fokus pada solusi berkelanjutan, dan Digital Solutions Zone, sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan AI, blockchain, dan IoT dalam rantai pasok — yang kini membantu meningkatkan transparansi, mengurangi limbah lewat sampling virtual 3D, dan mengoptimalkan logistik dengan analitik prediktif.

Digital Solutions Zone: Wadah Inovasi Digital : Digital Solutions Zone dan sesi seminar terkait kini menjadi pilihan utama bagi peserta pameran seperti Quaternion, Shima Seiki, dan Symmpix, yang menampilkan inovasi seperti peramalan permintaan berbasis AI, sampling virtual 3D (yang dapat mengurangi limbah kain hingga 30%), dan paspor produk digital untuk mendukung praktik pengadaan yang etis.

Mr Herman Chan, General Manager Symmpix, mengatakan “Zona ini sangat sesuai dengan arah pengembangan kami. Kami bertemu pembeli yang mencari solusi transformasional — mulai dari AI generatif untuk desain hingga sistem produksi yang dipersonalisasi. Bahkan di hari pertama, kami sudah terhubung dengan klien yang ingin langsung mengaplikasikan solusi ini dalam bisnis mereka.”

Premium Wool Zone: Merespons Tren Pakaian Kustom dan Bahan Mewah : Meningkatnya posisi China sebagai produsen pakaian kustom kelas dunia telah mendorong permintaan akan kain mewah, baik dari individu maupun merek yang mengutamakan pakaian unik, penuh gaya, dan berkelas. Premium Wool Zone, yang identik dengan warisan dan kualitas, bersama Paviliun Milano Unica, menghadirkan 50 peserta pameran wol premium di zona SalonEurope. Beberapa nama ikonik yang tampil termasuk Abraham Moon & Sons (UK), Albini (Italia), Cavallo 1886 (Italia), dan Scabal NV/SA (UK) — semuanya memamerkan kain Eropa berkualitas tinggi yang sangat diminati pembeli asal Tiongkok.

Mr Federico Veronese, Sales Manager E.Thomas S.p.A, : “Sejak pertama kali ikut di tahun 1998, Intertextile Apparel sangat penting bagi kami. Kerjasama di industri tekstil itu vital, dan pameran ini membuka jalan bagi kami untuk terhubung dengan

pelanggan di Tiongkok. Italia dikenal dengan produk wol berkualitas tinggi dan kreatif. Pasar Tiongkok sangat penting bagi kami, dan kami berencana terus berinvestasi di sana.”

Premium Wool Zone pun terus berinovasi. Di edisi musim gugur tahun ini, area khusus Functional Suiting Display akan kembali dihadirkan, memungkinkan peserta pameran menampilkan lebih banyak potensi dan fleksibilitas material mereka.

Verve for Design: Jembatan Kreativitas Global dan Pasar Lokal : Verve for Design, yang menjadi wadah bagi tren pola dan motif terkini, kini menarik perhatian dunia mode Tiongkok, di mana para desainer muda mencari pola unik untuk mewujudkan ide kreatif mereka. Studio-studio seperti Atelier Mineeda (Jepang), Longina Phillips Designs (UK), dan PHN Studio (Argentina) ikut berpartisipasi, menghubungkan kreativitas global dengan kebutuhan lokal yang dinamis.

Ms Lucia Mu, Pattern Consultant PHN Studio, mengungkapkan “Arus pengunjung di Intertextile luar biasa. Kami terhubung dengan klien dari Tiongkok hingga Amerika Selatan yang mencari desain berkelanjutan — banyak dari mereka menggabungkan motif eco-friendly kami dengan bahan mereka sendiri untuk menciptakan koleksi yang berkesan.”

Musim gugur ini, zona ini akan kembali memberikan kesempatan bagi desainer dan studio dari seluruh dunia untuk bertemu langsung dengan produsen pakaian dan merek baru yang tengah mencari motif-motif inovatif.

Pameran ini diselenggarakan oleh Messe Frankfurt (HK) Ltd, Sub-Council of Textile Industry, CCPIT, dan China Textile Information Centre. Akan digelar bersamaan dengan Yarn Expo Autumn, CHIC, dan PH Value di National Exhibition and Convention

Center, Shanghai — menghadirkan keseluruhan rantai nilai industri tekstil dalam satu lokasi.

Info lebih lanjut:
www.intertextileapparel.com

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition 2025

Tanggal: 2 – 4 September 2025

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-93

Berita Utama

- Bersatu dalam Ekonomi Pancasila, Kunci Kebangkitan Industri Tekstil Nasional

Berita Terbaru

- Ekspor Tekstil TRIS Melonjak 13%, Bukti Kebangkitan Industri TPT Nasional
- Lebaran 2026 Jadi Momentum Penentu Kebangkitan Industri Tekstil Nasional
- Pemerintah Tegaskan Komitmen Menjaga Stabilitas Industri Tekstil Nasional
- Papua Perkuat SDM Tekstil Lewat Kemitraan dengan Industri Nasional
- Industri TPT dalam Tekanan: Tantangan Utilitas Rendah, Kenaikan Biaya, dan Akses Kredit yang Ketat
- Apsyfi Dorong Reformasi Sistem Impor untuk Hentikan Masuknya Tekstil Ilegal
- CIMB Niaga Dorong Transformasi Hijau Industri Tekstil Lewat Fasilitas SLL Rp117 Miliar
- Industri Tekstil dan Alas Kaki Menanti Kepastian Tarif Nol Persen dari Amerika Serikat

- Bandung Dorong Sinergi Tekstil Indonesia–Australia untuk Penguatan Rantai Pasok Global
- Purbaya Tegaskan Pengawasan Ketat Impor Tekstil Ilegal Demi Lindungi UMKM
- Larangan Thrifting Jadi Momentum Kebangkitan UMKM Tekstil, Asalkan Didukung Kebijakan Pemerintah
- Industri Tekstil Jabar Terhantam Impor, Jadi Penyumbang PHK Terbesar Sepanjang 2025
- Keberpihakan Pemerintah dalam Persaingan Industri Tekstil Lokal dan Impor Pakaian Bekas
- Gelombang Penutupan Pabrik Tekstil Kian Mengkhawatirkan, Ribuan Pekerja Terdampak
- IKFT Tetap Tangguh, Pertumbuhan Tembus 5,92% hingga Kuartal III-2025

BERITA UTAMA

Bersatu dalam Ekonomi Pancasila, Kunci Kebangkitan Industri Tekstil Nasional



Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi penting untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja dinilai menjadi kunci untuk membangun

ekosistem industri yang tangguh dan berkelanjutan.

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan akan mendorong kemajuan ekonomi berbasis Pancasila. Ia optimistis, dengan persatuan yang kuat, Indonesia mampu melampaui pertumbuhan negara-negara pesaing di kawasan.

“Kami di AGTI sangat yakin bahwa jika seluruh mitra kami—pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja—bersatu dalam semangat ekonomi Pancasila, potensi ekonomi kita bisa meningkat dua kali lipat. Bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk melampaui negara pesaing jika kita bersatu,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Anne menilai, semangat kolaboratif tersebut sejalan dengan program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, AGTI berkomitmen memperkuat daya saing produk garmen dan tekstil lokal dengan menjunjung nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Komitmen itu juga terlihat dalam langkah AGTI yang baru-baru ini mengadakan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pertemuan tersebut, AGTI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim industri yang kondusif agar sektor TPT dapat tumbuh dan berinovasi.

Anne menambahkan bahwa sektor tekstil dan garmen memiliki peran strategis sebagai industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat. Menurutnya, industri ini memberikan kesempatan luas bagi masyarakat, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

“Sila ketiga kita adalah Persatuan Indonesia. Karena itu, saya mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mencintai dan menjaga industri padat karya ini. Industri tekstil mampu memberikan transformasi besar, apalagi di era industri 4.0 yang sedang digalakkan oleh Kementerian Perindustrian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menegaskan bahwa pembangunan industri TPT tidak hanya berfokus pada efisiensi dan daya saing, tetapi juga harus menegakkan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Pendekatan yang diusung AGTI, katanya, bukan sekadar mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui kolaborasi dengan pemerintah, pekerja, dan akademisi.

Dengan semangat persatuan dan kolaborasi lintas sektor, AGTI optimistis industri tekstil Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai cita-cita ekonomi Pancasila.

**The Introduction ;
A history, journey and development
of the Indonesia
textile and garment industry**

INDOTEXTILES TV

The Indonesia Textiles, Apparel & Fashion Community Reference





BERITA TERBARU

Ekspor Tekstil TRIS Melonjak 13%, Bukti Kebangkitan Industri TPT Nasional

Kinerja PT Trisula International Tbk (TRIS) terus menunjukkan tren positif seiring dengan pulihnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Pada kuartal III tahun 2025, perusahaan berhasil mencatatkan lonjakan penjualan dan laba bersih dua digit, menegaskan posisi TRIS sebagai salah satu pemain utama di sektor TPT Indonesia.

Berdasarkan laporan kinerja hingga September 2025, TRIS membukukan penjualan sebesar Rp1,18 triliun, naik 10% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1,08 triliun. Sementara itu, laba bersih perusahaan meningkat 29% menjadi Rp80,23 miliar.

Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif di hampir seluruh segmen bisnis. Segmen manufaktur tetap menjadi penyumbang utama dengan perolehan Rp974,10 miliar atau naik 10%. Disusul segmen distribusi yang tumbuh 7% menjadi Rp240,22 miliar, serta segmen seragam yang mencatatkan

lonjakan signifikan hingga 111% menjadi Rp234,30 miliar.

Penjualan ekspor masih menjadi motor utama pertumbuhan TRIS dengan kontribusi mencapai 61% dari total pendapatan. Sepanjang kuartal III/2025, ekspor TRIS meningkat 13% menjadi Rp720,10 miliar, dengan Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru sebagai pasar utama.

Meski fokus pada pasar global, penjualan domestik juga menunjukkan peningkatan sebesar 5% year-on-year menjadi Rp468,77 miliar. Keberhasilan ini dicapai di tengah tantangan industri seperti kebijakan tarif tinggi di pasar global dan persaingan ketat dengan produk impor murah di dalam negeri.

Presiden Direktur TRIS, Widjaya Djohan, menyampaikan bahwa hasil positif ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan. "Capaian positif TRIS sampai dengan periode ini adalah bukti keberhasilan kami menjaga reputasi dan kepercayaan di mata para pelanggan. Saat industri tekstil nasional mulai menguat, kami semakin optimistis terhadap prospek bisnis ke depan," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Strategi diversifikasi pasar dan fokus pada niche market menjadi salah satu kekuatan utama TRIS dalam menjaga stabilitas bisnis. Perusahaan juga dikenal fleksibel dalam memenuhi pesanan, baik dalam jumlah kecil maupun tingkat kesulitan tinggi, serta memastikan konsistensi kualitas melalui integrasi antarunit usaha.

Dengan strategi yang matang, TRIS optimistis mampu mencapai target pertumbuhan pendapatan 10% pada akhir tahun. Selain memperluas jangkauan ekspor ke pasar potensial, perusahaan juga berkomitmen

memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Optimisme pasar terhadap kinerja positif TRIS juga tercermin di bursa saham. Pada perdagangan terakhir, harga saham TRIS ditutup menguat 19,34% ke level Rp216 per lembar, menandakan kepercayaan investor terhadap prospek cerah industri tekstil Indonesia dan solidnya fundamental perusahaan.

Dengan momentum pertumbuhan ini, TRIS tidak hanya menunjukkan ketangguhan bisnisnya di tengah persaingan global, tetapi juga menjadi bagian penting dari kebangkitan industri tekstil nasional menuju daya saing yang lebih kuat di pasar internasional.

Lebaran 2026 Jadi Momentum Penentu Kebangkitan Industri Tekstil Nasional



Asosiasi Produsen Serat dan Barang Filament Indonesia (APSyFI) menilai momentum Lebaran 2026 akan menjadi titik krusial bagi kebangkitan industri tekstil nasional. Pemerintah diminta mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi produsen lokal agar mampu menguasai pasar domestik dan menekan tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih membayangi sektor manufaktur.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menegaskan bahwa pemerintah harus

menunjukkan keberpihakan nyata terhadap industri dalam negeri dengan memperketat pengawasan dan penindakan terhadap praktik impor ilegal yang selama ini menggerus pasar lokal. Ia menyebut, tanpa langkah tegas, produsen dalam negeri akan terus kalah bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri pasar.

“Momentum Lebaran tahun depan menjadi faktor penentu apakah industri tekstil bisa bangkit atau justru melanjutkan tren PHK,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Menurut Redma, terakhir kali industri tekstil merasakan dampak positif dari penjualan Lebaran terjadi pada 2022, ketika pembatasan impor diberlakukan pascapandemi Covid-19. Namun, dalam tiga tahun terakhir, situasi berubah drastis akibat maraknya impor yang kembali mendominasi pasar domestik.

“Selama tiga tahun berturut-turut, barang impor terus menguasai pasar. Para produsen tekstil sudah tidak pernah ‘Lebaran’ lagi, dampaknya adalah PHK dan penutupan pabrik,” katanya.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, APSyFI mendorong pemerintah mengambil dua langkah strategis jelang Lebaran 2026. Pertama, menindak tegas praktik impor ilegal, terutama impor borongan yang kerap menjadi pintu masuk barang murah dari luar negeri. Kedua, memperkuat perlindungan industri nasional dengan menerapkan bea masuk anti dumping sementara (BMADS) dan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS), atau dengan membatasi kuota impor.

“Penyakit utama kita di pasar domestik adalah persaingan yang tidak fair. Pemerintah harus bertindak cepat agar industri dalam negeri bisa bangkit dengan momentum Lebaran ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) Agus Riyanto meminta pengusaha agar tidak terburu-buru melakukan PHK menjelang Lebaran. Ia menilai, langkah tersebut justru dapat memperburuk situasi industri yang tengah berjuang untuk bertahan.

“Meski kami tahu akan ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengusaha untuk THR karyawan, namun PHK justru akan memperburuk situasi industri,” ujarnya.

Agus menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan pelaku industri kecil dan menengah yang menjadi bagian penting dari rantai pasok tekstil nasional. Ia berharap Kementerian Perindustrian segera mengambil kebijakan nyata untuk memangkas kuota importir dan memberikan ruang lebih besar bagi produsen dalam negeri.

“Kami menunggu gebrakan dari pemerintah untuk membatasi impor dan mengutamakan produk lokal. Jika ini bisa dilakukan, Lebaran 2026 bisa menjadi momentum kebangkitan industri tekstil Indonesia,” tutupnya.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Menjaga Stabilitas Industri Tekstil Nasional



Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional di tengah berbagai tantangan yang melanda sektor tersebut. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas kondisi terkini industri tekstil, termasuk salah satu perusahaan besar, Sritex, yang tengah menghadapi proses hukum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden ingin mendapatkan perkembangan terbaru mengenai situasi industri tekstil dan memastikan perusahaan-perusahaan tetap beroperasi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak kurator terkait status pailit Sritex, sehingga setiap langkah dapat ditempuh secara hati-hati dan sesuai prosedur.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Industri tekstil didorong untuk tetap menjalankan aktivitas produksi, sementara para pekerja diimbau untuk tetap tenang. Pemerintah, ujar Yassierli, tengah menyiapkan langkah terbaik agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi selama proses hukum berjalan.

Yassierli menambahkan bahwa perlindungan tenaga kerja menjadi perhatian utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh hak karyawan Sritex dijaga dan tidak ada kekhawatiran berlebih mengenai masa depan mereka. Ia juga menyebutkan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan telah dikirim langsung ke lokasi untuk memantau kondisi dan memastikan situasi tetap kondusif.

Melalui rapat dan langkah koordinatif tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas

industri tekstil sebagai salah satu sektor strategis nasional. Upaya bersama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi keberlangsungan industri tekstil Indonesia.

Papua Perkuat SDM Tekstil Lewat Kemitraan dengan Industri Nasional



Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor desain dan tekstil dengan menggandeng industri nasional. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah rencana pengiriman anak muda Papua untuk belajar langsung di fasilitas produksi milik Gajah Group di Bandung.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengungkapkan komitmen tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke pabrik tekstil Gajah Group pada Sabtu (15/11/2025). Menurutnya, kolaborasi dengan pelaku industri besar menjadi kunci dalam membangun kemandirian ekonomi Papua di masa depan.

Fakhiri menjelaskan bahwa penguasaan keterampilan desain dan proses produksi tekstil sangat penting bagi generasi muda Papua. Pemerintah provinsi berencana mengirim anak muda yang memiliki minat dan kemampuan dalam seni lukis maupun desain untuk menimba ilmu langsung dari

tenaga ahli di Gajah Group. Ia berharap para peserta nantinya dapat menerapkan ilmu tersebut di daerah asal dan berkontribusi pada tumbuhnya industri tekstil lokal.

Harapan Gubernur juga mencakup kemungkinan hadirnya industri tekstil di Jayapura melalui kerja sama jangka panjang. Dengan transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM, Papua dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ini.

Direktur Gajah Group, Dedy Zein, menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kunjungan ini sebagai awal yang positif untuk memperkuat hubungan antardaerah dan industri. Menurutnya, sinergi seperti ini dapat membuka peluang pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Industri TPT dalam Tekanan: Tantangan Utilitas Rendah, Kenaikan Biaya, dan Akses Kredit yang Ketat



Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih berada dalam fase kontraksi akibat berbagai tekanan yang menahan laju pertumbuhannya. Data Kementerian Perindustrian mencatat bahwa utilitas produksi industri tekstil hanya berada di angka 50%, sementara industri pakaian jadi berada di level 70% per Agustus 2025. Kondisi ini diperparah dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) TPT yang masih berada di zona kontraksi, yakni 49,74 poin pada Oktober 2025. Pertumbuhan subsektor

tekstil dan pakaian jadi pun hanya mencapai 0,93% pada kuartal III/2025, menunjukkan lemahnya momentum pemulihan industri.

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menjelaskan bahwa sejumlah tantangan utama menjadi penyebab rendahnya kinerja industri TPT. Salah satu kendala paling menonjol adalah fluktuasi harga bahan baku global yang mendorong kenaikan biaya produksi. Di tengah pelemahan daya beli masyarakat, pelaku industri terpaksa menahan harga jual agar tetap kompetitif, sehingga margin keuntungan semakin tertekan.

Meski demikian, sebagian besar pelaku industri TPT dinilai mampu beradaptasi melalui berbagai langkah efisiensi. Upaya yang dilakukan antara lain penghematan energi, penggunaan bahan baku yang lebih efisien, diversifikasi produk bernilai tambah, serta optimalisasi rantai pasok. Langkah-langkah tersebut membantu menjaga daya saing tanpa perlu melakukan kenaikan harga yang agresif. Strategi adaptif ini dinilai efektif dalam mempertahankan keberlanjutan usaha sekaligus menjaga loyalitas pelanggan.

Dalam jangka menengah, transformasi menuju produksi berkelanjutan dan digitalisasi proses manufaktur dipandang sebagai kunci memperkuat struktur biaya dan profitabilitas perusahaan. Namun, upaya modernisasi ini masih terkendala oleh bunga kredit yang dinilai kurang kompetitif. Selain itu, pelaku industri menghadapi tuntutan penyesuaian terhadap standar keberlanjutan (ESG) yang menjadi persyaratan utama pasar ekspor, serta kebutuhan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang memerlukan pelatihan intensif dan pendanaan yang memadai.

Anne menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan yang cukup

membantu, seperti insentif investasi, pembiayaan industri hijau, serta program peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri. Dukungan ini menjadi fondasi penting bagi transformasi industri TPT agar tetap mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap produk domestik bruto (PDB).

Agar momentum pertumbuhan industri TPT dapat terjaga, Anne menekankan pentingnya kepastian kebijakan industri dan perdagangan untuk mendorong kelancaran perencanaan investasi. Selain itu, perlu adanya akses pembiayaan dan insentif investasi yang lebih luas untuk mendukung modernisasi mesin dan proses produksi. Fasilitasi sertifikasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta percepatan digitalisasi rantai pasok dan transisi energi hijau juga diperlukan guna memperkuat daya saing industri dalam jangka panjang.

Dengan kombinasi adaptasi pelaku industri dan dukungan kebijakan pemerintah, prospek sektor TPT diyakini berpotensi kembali positif dan mampu menjadi salah satu penggerak utama sektor manufaktur nasional.

Apsyfi Dorong Reformasi Sistem Impor untuk Hentikan Masuknya Tekstil Ilegal



Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) mendesak pemerintah segera menerapkan sistem port to port

manifest guna menekan maraknya penyelundupan dan praktik mis-declare yang selama ini merugikan industri tekstil nasional. Sistem tersebut mengandalkan dokumen ekspor asli dari negara asal sebagai dasar pemeriksaan impor, bukan lagi inland manifest atau pemberitahuan impor barang (PIB) yang dibuat sendiri oleh importir.

Ketua Umum Apsyfi, Redma Gita Wirawasta, menjelaskan bahwa penggunaan PIB sebagai dokumen utama pemasukan barang membuat data impor sangat rentan dimanipulasi. Dengan skema self declare yang berlaku saat ini, peluang pemalsuan dokumen dan mis-declare menjadi sangat besar dan kerap terjadi. Kondisi ini tercermin dari adanya selisih besar antara data ekspor negaramitra dan data impor Indonesia pada 2024. Apsyfi mencatat nilai impor yang tidak tercatat mencapai US\$ 24,10 miliar, sementara untuk komoditas tekstil dan produk tekstil saja nilainya mencapai sekitar US\$ 2 miliar.

Redma menuturkan bahwa banyak negara telah menerapkan sistem dokumen impor yang langsung bersumber dari dokumen ekspor asli. Dokumen tersebut dikirim secara elektronik dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan saat kapal berangkat, sehingga otomatis menjadi dokumen impor sah tanpa dapat diubah lagi oleh importir. Dengan cara ini, celah manipulasi bisa ditutup rapat.

Selain perbaikan sistem dokumen, Apsyfi meminta Bea Cukai memperkuat pengawasan fisik di pelabuhan dengan menerapkan pemindaian kontainer secara menyeluruh. Redma mengatakan bahwa di sejumlah negara, semua kontainer dipindai tanpa pengecualian. Jika hasil pemindaian tidak sesuai dengan dokumen, maka kontainer tersebut langsung masuk jalur merah untuk dibuka dan diperiksa manual. Menurutnya, sistem pengawasan di Indonesia masih lemah karena kontainer

yang masuk jalur hijau bisa melintas tanpa pemeriksaan, dan penentuan jalur bergantung pada profiling yang berpotensi disalahgunakan.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdriaman, juga menyoroti masalah serupa terkait praktik impor borongan yang sering kali langsung masuk jalur hijau. Ia mempertanyakan dasar penetapan risiko bagi importir jenis tersebut yang dinilai janggal. Menurutnya, importir borongan cukup membayar sekitar Rp 150 juta per kontainer tanpa perhitungan pajak dan bea masuk yang sebenarnya. Padahal, satu kontainer 40 kaki berisi pakaian jadi bernilai sekitar Rp 2,4 miliar, sehingga seharusnya bea masuk dan pajak yang dibayar bisa mencapai Rp 1 miliar, atau minimal Rp 450 juta untuk barang dari negara mitra dagang.

Nandi menegaskan dukungan penuh kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas pelanggaran kepabeanan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Ia menyebut bahwa praktik impor ilegal ini telah membuat banyak pengusaha dan pekerja konveksi terpuruk. Menurutnya, langkah tegas pemerintah memberikan harapan baru bagi kebangkitan industri konveksi dan tekstil dalam negeri.



CIMB Niaga Dorong Transformasi Hijau Industri Tekstil Lewat Fasilitas SLL Rp117 Miliar

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Primarajuli Sukses, anak usaha dari PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI), resmi menandatangani fasilitas modal kerja berbasis Sustainability-Linked Loan (SLL) dengan nilai mencapai Rp117 miliar. Kerja sama ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam mendukung pengembangan industri tekstil yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon.

Head of Commercial Banking CIMB Niaga, Christian Prajitno, menegaskan bahwa bank terus mendorong nasabah untuk bertransisi menuju praktik bisnis berkelanjutan melalui pembiayaan hijau. Menurutnya, sektor manufaktur—termasuk industri tekstil—memiliki potensi besar untuk melakukan dekarbonisasi. Ia berharap fasilitas pembiayaan berkelanjutan seperti ini dapat diperluas dan diaplikasikan ke lebih banyak sektor industri.

Di sisi lain, Direktur Ever Shine Tex, Michael Sung, mengungkapkan bahwa Grup ESTI telah lama menerapkan sejumlah inisiatif keberlanjutan. Upaya tersebut meliputi penggunaan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya, peremajaan mesin dan boiler hemat energi, pemanfaatan gas alam, hingga penerapan cooling-as-a-service untuk meningkatkan efisiensi. Inisiatif-inisiatif tersebut terbukti berkontribusi

dalam menekan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca.

Kolaborasi ini juga mencakup kerja sama penggunaan platform CarbonIQ dari Jejakin (PT Jejak Enviro Teknologi). Melalui platform ini, Primarajuli Sukses dapat memantau dan melaporkan emisi gas rumah kaca secara digital dan transparan, sehingga mendukung pencapaian target keberlanjutan yang ditetapkan dalam skema SLL bersama CIMB Niaga.

Langkah ini menegaskan komitmen CIMB Niaga dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Bank terus berupaya menyediakan solusi keuangan yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan mitigasi perubahan iklim. Hingga 30 September 2025, hampir 24 persen dari total pembiayaan CIMB Niaga atau sekitar Rp54,7 triliun telah dialokasikan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB.

Industri Tekstil dan Alas Kaki Menanti Kepastian Tarif Nol Persen dari Amerika Serikat



Pelaku industri tekstil dan alas kaki Indonesia tengah berada dalam situasi penuh kekhawatiran seiring belum tuntasnya negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Mereka berharap produk

manufaktur unggulan—khususnya tekstil dan alas kaki—dapat memperoleh tarif rendah bahkan nol persen dalam skema dagang baru yang sedang dirumuskan pemerintah bersama AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa negosiasi tarif resiprokal telah memasuki fase akhir dan ditargetkan selesai dalam tahun ini. Saat ini kedua negara sedang menyusun legal drafting sebagai tahap penentu. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi AS berpeluang mendapat tarif nol persen, seperti CPO, karet, produk karet, teh, dan kopi. Namun posisi tarif untuk tekstil dan alas kaki masih menjadi topik negosiasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindawardana menegaskan bahwa tarif resiprokal sebesar 19 persen yang dikenakan AS saat ini menjadi tekanan besar bagi industri domestik. Ia berharap tarif tersebut dapat ditekan hingga nol persen. Menurutnya, sampai sekarang belum ada kepastian apakah produk tekstil dan produk tekstil (TPT) akan termasuk dalam kategori barang yang memperoleh keringanan tarif.

API berencana bertemu pemerintah dalam waktu dekat untuk membahas posisi tawar Indonesia dalam negosiasi tersebut. Danang menekankan bahwa sektor TPT merupakan industri padat karya yang membutuhkan keberpihakan agar mampu mempertahankan daya saing global. Ia juga mengingatkan bahwa selain tarif resiprokal, industri masih menanggung tarif most favoured nation (MFN) sebesar 5–10 persen. Tanpa penurunan tarif dari AS, beban industri dinilai akan semakin berat.

Danang menyebut Indonesia memiliki argumen kuat dalam negosiasi, yaitu

komitmen mengimpor kapas dari AS. Kapas tersebut memiliki kualitas baik dan harga kompetitif serta menjadi salah satu bahan baku penting industri TPT. Dengan nilai impor kapas yang signifikan, Indonesia berharap produk tekstil dan garmen yang diekspor ke AS layak memperoleh tarif nol persen. Data impor menunjukkan bahwa kapas merupakan komoditas ke-25 terbesar yang diimpor Indonesia, dengan Amerika Serikat berada di posisi ketiga pemasok utama setelah China dan Australia. Peningkatan impor kapas dari AS dapat menjadi ruang negosiasi untuk mendapatkan tarif khusus dari Washington.

Di sektor alas kaki, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda juga menyatakan belum menerima informasi apakah produk alas kaki akan masuk daftar penerima tarif nol persen. Meski demikian, pelaku industri tetap berharap agar tarif 19 persen dapat diturunkan setidaknya mendekati 10 persen atau bahkan lebih rendah, sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan negara pesaing seperti Vietnam, Kamboja, dan China. Tarif yang terlalu tinggi dikhawatirkan tidak hanya membebani produsen, tetapi juga menekan daya beli publik AS akibat kenaikan harga produk impor.

Selain persoalan tarif, Aprisindo mendorong pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menjaga keberlangsungan industri. Insentif tersebut meliputi potongan harga gas dan listrik industri, relaksasi pemasangan panel surya, serta penangguhan program BPJS Ketenagakerjaan tertentu yang dinilai membebani arus kas perusahaan. Mekanisme restitusi PPN subkontrak di kawasan berikat juga menjadi sorotan karena menghambat perputaran modal akibat lamanya proses pencairan yang bisa lebih dari setahun. Negara-negara pesaing disebut tidak menerapkan kewajiban serupa,

sehingga struktur biaya industri alas kaki Indonesia dinilai kalah kompetitif.

Billie menilai penghapusan PPN subkontrak akan menjadi langkah konkret untuk menjaga tenaga kerja, meningkatkan daya saing, dan memperkuat ekspor di tengah tekanan tarif. Selain itu, pelaku industri juga meminta pemerintah melakukan deregulasi untuk memudahkan perizinan, mulai dari penyederhanaan dokumen amdal hingga proses perpanjangan izin bahan berbahaya dan sertifikasi mesin.

Dengan kompleksitas tantangan mulai dari tarif tinggi hingga beban biaya produksi, pelaku industri menaruh harapan besar pada hasil akhir negosiasi Indonesia-AS. Kejelasan dan keberpihakan pemerintah dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga kelangsungan ribuan tenaga kerja serta masa depan daya saing industri tekstil dan alas kaki Indonesia di pasar global.



Bandung Dorong Sinergi Tekstil Indonesia–Australia untuk Penguatan Rantai Pasok Global

Industri tekstil Indonesia kembali menjadi sorotan dalam seminar Indonesia, Sustainable Sourcing Hub For Textile, Apparel and Beyond yang digelar di Australia pada Kamis (20/11). Acara tersebut menjadi penutup rangkaian Global Sourcing Expo

(GSE) 2025 serta menghadirkan diskusi mendalam mengenai peluang kemitraan rantai pasok tekstil antara Indonesia dan Australia.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin menegaskan bahwa pelaku industri kecil menengah (IKM) Bandung siap memperluas pasar ekspor melalui kolaborasi manufaktur dengan pelaku industri kreatif Australia. Ia menekankan bahwa Bandung sejak lama dikenal sebagai pusat ekosistem tekstil nasional, dari hulu hingga hilir. Melalui skema IA-CEPA, meningkatnya preferensi terhadap produksi etis, serta kebutuhan pesanan skala kecil berkualitas tinggi, pasar Australia dinilai semakin terbuka.

Ronny menambahkan bahwa keunggulan IKM Bandung terletak pada kemampuan produksi kreatif, inovasi desain, penggunaan pewarna alami, hingga pengerjaan small-batch premium yang diminati pasar internasional.

Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono, turut menyoroti daya saing kuat Indonesia dalam rantai pasok global. Nilai ekspor tekstil Indonesia meningkat signifikan dari USD 9,1 miliar pada 2020 menjadi sekitar USD 11 miliar pada 2024. Meski menghadapi tantangan seperti tarif tinggi di Amerika Serikat dan persaingan dengan produk impor murah, Indonesia tetap memiliki keunggulan berupa infrastruktur industri, tenaga kerja terampil, dan kapasitas produksi yang besar.

Dalam diskusi, konsep “Designed in Australia, crafted in Indonesia” menjadi gagasan utama untuk meningkatkan daya saing kedua negara. Kolaborasi ini menawarkan efisiensi produksi dari Indonesia dan kekuatan desain dari Australia. Siswo menilai, pendekatan tersebut memungkinkan Australia menciptakan produk unggulan dengan biaya

lebih kompetitif, sekaligus memberikan nilai tambah bagi kapasitas industri Indonesia.

Ronny juga menyoroti pertumbuhan industri tekstil Australia yang mengalami lonjakan signifikan. Ekspor tekstil Australia tercatat sekitar USD 230 juta pada 2020 dan meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar USD 500 juta pada 2024. Peningkatan ini membuka peluang besar untuk menciptakan titik temu kolaboratif, di mana kedua negara memperkuat daya saing tanpa saling menyaingi.

Ia meyakini bahwa kolaborasi Indonesia–Australia tidak lagi sekadar transaksi perdagangan, tetapi menjadi fondasi penciptaan keunggulan bersama dalam pasar global. Kerja sama ini dipandang mampu membuka jalan bagi masa depan industri tekstil yang lebih kreatif, berkelanjutan, dan kompetitif.

Kegiatan tersebut menegaskan bahwa sinergi antara Indonesia dan Australia merupakan langkah strategis dalam membangun rantai pasok tekstil masa depan yang kuat, efisien, serta berorientasi ekspor. Kota Bandung mengambil peran penting sebagai motor pendorong, membawa industri kreatif lokal untuk terus melangkah ke pasar internasional.

Purbaya Tegaskan Pengawasan Ketat Impor Tekstil Ilegal Demi Lindungi UMKM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap impor tekstil ilegal langsung di area pelabuhan. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya keluhan pedagang pakaian bekas impor (thrifting) yang menuding bahwa

banjir produk tekstil dari China telah menekan pelaku UMKM di sektor fesyen.

Dalam agenda APBN Kita di Jakarta pada Kamis (20/11/2025), Purbaya menyebut pemerintah akan melakukan pemeriksaan lebih teliti terhadap setiap pemasukan barang yang berpotensi ilegal. Ia juga memastikan akan dilakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi pelaku penyelundupan yang selama ini lolos dari pengawasan.

“Kalau dulu bisa lepas, ke depan-depan enggak bisa lagi. Jadi memang kalau ada impor ilegal, ya kita beresin,” ujarnya tegas.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah memanasnya perdebatan mengenai keberadaan bisnis thrifting di Indonesia. Sebelumnya, sejumlah pedagang thrifting mendatangi Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI untuk menyampaikan keluhan atas pengetatan pemerintah terhadap perdagangan pakaian bekas impor. Mereka meminta solusi jangka pendek hingga jangka panjang, karena selama ini usaha thrifting sering kali dianggap mengganggu UMKM lokal.



Rifai Silalahi, pedagang thrifting dari Pasar Senin, menyampaikan bahwa pihaknya merasa mendapat stigma yang berulang setiap tahun. Ia menegaskan bahwa segmen pasar pakaian bekas impor berbeda dengan industri tekstil lokal sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman langsung. Rifai bahkan menyebut bahwa

dominasi produk tekstil impor dari China yang mencapai sekitar 80% pangsa pasar justru menjadi penyebab utama terganggunya pelaku UMKM.

Menurutnya, tuduhan terhadap bisnis thrifting kemungkinan muncul karena keberadaannya mulai mengusik arus barang dari China yang “bebas” membanjiri pasar domestik. Kondisi ini membuat pelaku thrifting menilai pentingnya penindakan yang lebih tegas terhadap impor tekstil ilegal agar kompetisi pasar berlangsung lebih adil.

Langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan di pelabuhan menjadi sinyal bahwa pengetatan terhadap barang ilegal tengah menjadi fokus utama. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat sekaligus memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang tanpa tekanan dari produk ilegal yang masuk secara masif.

Larangan Thrifting Jadi Momentum Kebangkitan UMKM Tekstil, Asalkan Didukung Kebijakan Pemerintah



Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menegaskan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas atau thrifting harus diikuti dengan dukungan nyata bagi UMKM tekstil nasional. Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menilai bahwa penguatan kemandirian industri lokal mutlak diperlukan agar efek kebijakan benar-benar dirasakan seluruh pelaku usaha, bukan sekadar industri

besar. Pernyataan ini muncul di tengah rencana pemerintah yang semakin serius menghapus praktik thrifting, yang dinilai dapat membuka peluang bagi kebangkitan industri clothing lokal, termasuk di Kota Bandung.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurdin. Ia mengungkapkan bahwa larangan thrifting telah memberikan angin segar bagi pelaku industri tekstil dan clothing Bandung. Menurut Ronny, geliat industri lokal kini kembali terasa. Bahkan, sebuah brand distro yang sempat vakum selama satu dekade mulai kembali beroperasi. Bandung yang dikenal sebagai barometer industri clothing nasional disebut memiliki potensi besar menarik pembeli dari luar negeri, terutama dari Malaysia dan Singapura. Namun, Ronny mengingatkan pentingnya inovasi produk serta penguatan strategi pemasaran agar brand lokal mampu bersaing di pasar domestik maupun ekspor.

Meski kebijakan larangan impor pakaian bekas terus diperkuat, data Statistik Indonesia menunjukkan bahwa impor pakaian bekas dan tekstil masih mencapai US\$78,19 juta atau sekitar Rp1,3 triliun pada periode Januari–Juli 2025. Pasokan terbesar berasal dari China, Vietnam, dan Bangladesh, menandakan bahwa tantangan penegakan kebijakan masih cukup besar.

Anggawira menilai bahwa diperlukan kebijakan yang terukur agar momentum ini mampu memperkuat industri tekstil nasional secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM menjadi kunci agar produk sandang lokal dapat meningkatkan daya saing, tidak hanya di pasar dalam negeri tetapi juga di pasar global. Dengan dukungan yang tepat, pelarangan thrifting dapat menjadi titik balik bagi kebangkitan industri tekstil Indonesia.

Industri Tekstil Jabar Terhantam Impor, Jadi Penyumbang PHK Terbesar Sepanjang 2025



Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat tengah mengalami fase tersulit dalam beberapa tahun terakhir. Lesunya permintaan pasar akibat tingginya serbuan produk impor, baik legal maupun ilegal, menyebabkan industri ini menjadi kontributor terbesar pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat sepanjang 2025. Mayoritas pelaku industri tekstil berjalan berdasarkan permintaan pasar, namun kini permintaan tersebut melemah signifikan karena pasar dalam negeri harus bersaing dengan produk impor dalam jumlah besar. Staf Sekretariat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jabar, Gerald Holomoan, mengungkapkan bahwa tekanan terhadap industri TPT terjadi dari dua arah. Produk pakaian jadi dihilir menghadapi kompetisi ketat dari barang impor ilegal seperti produk thrifting, sedangkan sektor hulu diserbu produk impor legal yang semakin menguasai pasar. Kondisi ini membuat industri padat karya menjadi sulit menyerap tenaga kerja dan berdampak langsung pada meningkatnya PHK. Bahkan, tak sedikit perusahaan besar mempertimbangkan untuk relokasi pabrik ke wilayah yang menawarkan biaya produksi lebih rendah seperti Jawa Tengah.

Geraldi juga menyoroti potensi PHK pada pelaku usaha skala kecil seperti industri kecil menengah (IKM). Banyak IKM yang memproduksi barang umum seperti pakaian bayi atau pakaian keagamaan, namun kalah bersaing dengan produk impor serupa yang lebih murah. Jika tekanan impor terus terjadi, gelombang PHK di sektor ini tidak lagi dapat dihindari. Ia menegaskan bahwa pada 2026, fokus utama API Jabar adalah mempertahankan pasar demi menjaga daya tahan industri dan keberlangsungan sektor TPT nasional.

Berbeda dengan kondisi tersebut, sektor perhotelan dan restoran di Jawa Barat dilaporkan belum mengalami PHK selama 2025. Ketua PHRI Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, menyebutkan bahwa penyesuaian yang dilakukan sejauh ini hanya sebatas pengurangan jam kerja akibat rendahnya tingkat hunian hotel.

Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran, Ferry Hadiyanto, menyampaikan kekhawatirannya bahwa gelombang PHK yang dipicu oleh sektor padat karya semakin membesar bak bola salju. Meskipun investasi di Jabar tercatat tinggi, namun sebagian besar mengalir pada industri padat modal yang tidak memberi kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ia menilai relokasi industri ke Jawa Tengah seharusnya tidak menjadi masalah selama masih dalam wilayah NKRI, namun Jabar akan menanggung dampak besar berupa meningkatnya pengangguran jika tidak segera mengantisipasinya.

Ferry menekankan perlunya perhatian khusus pemerintah daerah, mengingat transformasi industri menuju era 4.0 tidak diimbangi kesiapan tenaga kerja yang masih didominasi pekerja berkemampuan rendah. Jika tidak ada kebijakan dan insentif bagi sektor padat karya, ia memperingatkan bahwa PHK akan terus meningkat. Ia juga

meminta kejelasan dari pemerintah pusat mengenai posisi Jawa Barat sebagai wilayah sentra industri padat karya nasional.

Pandangan serupa diungkapkan anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, yang menilai kebijakan pemerintah provinsi lebih condong kepada investor padat modal daripada usaha padat karya. Menurutnya, ketergantungan pada teknologi membuat penyerapan tenaga kerja minim meskipun pertumbuhan ekonomi secara angka tampak meningkat. Ia juga mengkritisi lemahnya pendataan kebutuhan tenaga kerja dan ketidaktepatan program pencari kerja yang tidak memberikan solusi nyata terkait kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Anggota Komisi V lainnya, Zaini Shofari dari PPP, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Jabar yang mencapai 5,20% lebih banyak ditopang konsumsi, bukan investasi sektor riil yang mampu membuka lapangan kerja. Ia menilai beberapa kebijakan provinsi masih kurang mendukung kondisi ekonomi dan perlu diimbangi dengan upaya membuka usaha legal yang dapat menampung tenaga kerja baru ketika sektor ilegal ditertibkan.

Dengan berbagai tekanan yang ada, masa depan industri TPT di Jawa Barat bakal bergantung pada keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor padat karya, menciptakan daya saing industri, serta menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Keberpihakan Pemerintah dalam Persaingan Industri Tekstil Lokal dan Impor Pakaian Bekas

Industri tekstil merupakan sektor yang membutuhkan investasi besar dan

melibatkan tenaga kerja dalam jumlah masif. Di balik ribuan pekerja tersebut, ada ribuan keluarga yang menggantungkan harapan dan kelangsungan hidup pada keberlanjutan industri ini. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil sikap yang tegas dan jelas dalam melindungi sektor strategis ini.

Fenomena yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan. Sebuah industri tekstil nasional yang padat modal dan tenaga kerja justru terancam bangkrut akibat membanjirnya pakaian bekas impor di pasar domestik. Pakaian bekas ini hadir dengan harga jauh lebih murah, bahkan banyak yang masih terlihat layak pakai dan mengikuti tren, sehingga menarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini memunculkan perdebatan yang membelah opini publik ke dalam dua sisi yang berseberangan.



Di satu sisi, masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan industri tekstil dalam negeri menolak perdagangan pakaian bekas impor karena berpotensi mematikan bisnis tekstil nasional dan mengancam mata pencaharian ribuan pekerja. Namun di sisi lain, kelompok masyarakat yang mengutamakan harga terjangkau menyambut baik kehadiran pakaian bekas karena dianggap sebagai alternatif ekonomis yang tetap memberikan pilihan gaya.

Pertanyaan besar kini muncul: di pihak siapa pemerintah akan berdiri? Keputusan

pemerintah sangat dinantikan untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua kepentingan tersebut.

Melihat situasi yang semakin mendesak, pemerintah tidak dapat lagi menganggap isu pakaian bekas sebagai persoalan kecil. Diperlukan kebijakan yang berpihak sekaligus adil. Salah satu langkah yang bisa dipertimbangkan adalah menetapkan pengenaan pajak impor terhadap pakaian bekas yang masih berkualitas sangat baik, bahkan tampak seperti baru. Kebijakan ini dapat menjadi upaya perlindungan bagi industri tekstil dalam negeri sekaligus memberikan pemasukan tambahan bagi negara.

Dengan kualitas pakaian bekas yang semakin baik, penerapan pajak yang proporsional akan menciptakan persaingan yang lebih sehat. Langkah ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah hadir dalam menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional tanpa langsung menutup akses masyarakat terhadap produk terjangkau.

Pada akhirnya, kebijakan yang tegas, adil, dan berpihak pada pembangunan industri nasional menjadi kebutuhan mendesak. Semoga pemerintah dapat mempertimbangkan langkah kebijakan yang tidak hanya melindungi perekonomian, tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial masyarakat secara luas.

Gelombang Penutupan Pabrik Tekstil Kian Mengkhawatirkan, Ribuan Pekerja Terdampak

Industri tekstil Indonesia tengah menghadapi tekanan yang semakin berat. Hingga akhir 2025, tercatat lima pabrik tekstil di sektor hulu telah menghentikan operasional dan menutup usaha mereka sepenuhnya. Kondisi

ini berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja yang diperkirakan mencapai sekitar 3.000 pekerja. Situasi ini dinilai sebagai tanda nyata bahwa proses deindustrialisasi tengah terjadi di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, mengungkapkan bahwa penyebab utama dari gelombang penutupan ini adalah kerugian serius akibat penjualan produk dalam negeri yang terus melemah. Banjirnya produk impor dengan harga dumping, terutama kain dan benang, membuat perusahaan lokal semakin sulit bersaing. Bahkan, enam pabrik lainnya kini hanya mampu beroperasi di bawah 50% kapasitas, sebagian sudah menerapkan sistem on-off karena kondisi produksi yang tidak stabil.

Farhan menegaskan bahwa jika pemerintah tidak mengambil langkah konkret dan transparan dalam mengendalikan impor, gelombang penutupan perusahaan diprediksi akan berlanjut pada 2026. Ia menilai pemerintah seharusnya mampu mengawasi dan menindak tegas impor yang tercatat melalui sistem bea cukai, terutama terkait distribusi kuota impor yang hingga kini belum jelas. Ketidakpastian ini membuat pelaku industri tidak dapat menetapkan rencana produksi jangka panjang.

Meski demikian, Farhan memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri Keuangan yang berkomitmen memperketat pengawasan impor ilegal, termasuk upaya penindakan impor pakaian bekas (thrifting). Ia berharap penyelidikan tersebut dapat mengungkap praktik kecurangan yang selama ini merugikan negara dan industri tekstil dalam negeri.

Adapun lima perusahaan yang telah resmi menutup produksi di sektor tekstil antara lain PT Polychem Indonesia di Karawang dan

Tangerang, PT Asia Pacific Fibers di Karawang, PT Rayon Utama Makmur bagian dari Sritex Group, serta PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) di Tangerang. Dengan kondisi ini, masa depan industri tekstil nasional memerlukan perhatian serius dan kebijakan perlindungan yang lebih kuat agar tidak semakin terpuruk di tengah persaingan global.

IKFT Tetap Tangguh, Pertumbuhan Tembus 5,92% hingga Kuartal III-2025



Sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) terus menunjukkan ketangguhan di tengah tantangan ekonomi global. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, sepanjang kuartal III-2025 sektor ini mampu tumbuh hingga 5,92% secara tahunan (YoY), dengan kontribusi sebesar 3,88% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Capaian ini sekaligus memperlihatkan peran strategis IKFT dalam menopang industri pengolahan nonmigas yang juga tumbuh 5,58% YoY, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,04%.

Direktur Jenderal IKFT Kemenperin, Taufiek Bawazier, menyebut bahwa ketahanan sektor ini tak terlepas dari kontribusi ekspor yang kuat. Sepanjang Januari-Agustus 2025, nilai ekspor IKFT mencapai US\$ 35,25 miliar, sementara impor berada pada posisi US\$ 32,31 miliar. Produk kimia, pakaian jadi, serta kulit dan alas kaki menjadi komoditas andalan dalam mendorong kinerja ekspor

tersebut. Namun, tingginya impor bahan baku kimia menegaskan perlunya penguatan industri hulu agar struktur manufaktur dalam negeri semakin kokoh.

Secara keseluruhan, utilisasi kapasitas produksi sektor IKFT berada pada kisaran 60%. Kebijakan hilirisasi, terutama pada industri kimia berbasis migas dan bahan galian bukan logam, menjadi salah satu pendorong stabilitas operasional. Tak hanya itu, realisasi investasi juga terus menunjukkan tren positif, yakni mencapai Rp142,15 triliun pada Januari-September 2025, meningkat dibandingkan Rp116,54 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor IKFT tercatat menyerap sekitar 6,7 juta pekerja hingga Februari 2025, atau 4,6% dari total tenaga kerja nasional, yang menunjukkan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Taufiek menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat sektor IKFT sebagai motor pertumbuhan industri nasional, melalui peningkatan konsumsi domestik, percepatan ekspor, dorongan investasi, dan strategi substitusi impor. Ia juga menyampaikan pentingnya kemandirian bahan baku, modernisasi permesinan, serta percepatan transformasi digital dan ekonomi sirkular dalam memperkuat daya saing industri.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan optimisme dunia usaha, sektor IKFT diyakini akan terus berkembang sebagai pilar penting dalam penguatan struktur manufaktur Indonesia dari hulu hingga hilir.



intertextile

SHANGHAI apparel fabrics

2 – 4.9.2025

**National Exhibition
and Convention
Center (Shanghai),
China**

Join the
world's biggest
apparel textile
fair

